

# BENCHMARKING

JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

## KONVERGENSI POLITIK ISLAM: PERILAKU ELEKTORAL WARGA NU TRENGGALEK TERHADAP PKS DAN DAMPAKNYA BAGI PETA POLITIK LOKAL

Agus Cahyono<sup>1\*</sup>, Teguh<sup>2</sup>, Akhmad Rizqon Khamami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sayyid Ali Rahmatullah Islamic State University of Tulungagung, Indonesia

Email: [ag08yp@gmail.com](mailto:ag08yp@gmail.com)<sup>1</sup> [muhammad.teguh.ridwan@gmail.com](mailto:muhammad.teguh.ridwan@gmail.com)<sup>2</sup> [rizqonkham@yahoo.com](mailto:rizqonkham@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

**Keywords:**

Convergence of Islamic  
Politics; Electoral Behavior;  
Nahdlatul Ulama (NU);  
Prosperous Justice Party  
(PKS); Local Politics of  
Trenggalek

---

**Correspondence Author:**

Agus Cahyono  
[ag08yp@gmail.com](mailto:ag08yp@gmail.com)

---

**Abstract**

This study aims to examine the phenomenon of Islamic political convergence through the electoral behavior of Nahdlatul Ulama (NU) members in Trenggalek towards the Prosperous Justice Party (PKS) and to analyze its impact on the configuration and dynamics of the local political map. This phenomenon is interesting because historically, NU is known to have cultural and political closeness to the National Awakening Party (PKB), while PKS is more representative of the modernist Islamic movement. Changes in the orientation of NU voters who show affiliation or sympathy towards PKS raise theoretical and empirical questions regarding the shift in Islamic political identity and the potential for the formation of new political spaces at the local level. The method used in this study is Systematic Literature Review (SLR) on 21 scientific articles published in the period 2013–2023, both from accredited national journals and reputable international journals. The articles reviewed were evaluated based on the suitability of the focus on the theme of Islamic political convergence, the relationship between NU and PKS, and changes in voter behavior at the local level. The results of the analysis show that political convergence between NU and PKS members is made possible by political pragmatism factors, PKS's inclusive digital preaching strategy, and the weakening of the ideological identity of traditional mass-based parties. In Trenggalek, this tendency has an impact on the shifting configuration of local political power, the weakening of PKB's dominance, and the emergence of a new electoral coalition configuration. In conclusion, Islamic political convergence opens up opportunities for more competitive local democratic dynamics, but at the same time challenges traditional ideological identities. The implications are important to consider in campaign design, Islamic political consolidation, and strengthening the value-based voter base.

---

### PENDAHULUAN

Fenomena pergeseran pilihan politik di kalangan masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi objek kajian politik elektoral semata, tetapi juga mencerminkan dinamika perubahan sosial, ideologis, dan identitas kolektif (Assegaf 2017). Di tengah pluralitas politik Islam di Indonesia, menarik untuk mencermati munculnya konvergensi antara kelompok-kelompok Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU) dengan partai-partai politik berideologi Islam modernis seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Trenggalek, sebuah kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur yang secara sosiologis merupakan basis kuat warga NU, menjadi contoh menarik dalam fenomena ini. Dalam beberapa pemilihan umum terakhir, sebagian warga NU di Trenggalek menunjukkan afiliasi elektoral yang cenderung mendukung PKS, yang secara historis dikenal sebagai partai berakar pada gerakan tarbiyah dan identik dengan Islam politik yang puritan dan ideologis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa dan

bagaimana warga NU yang identik dengan Islam tradisional beralih atau bersimpati pada PKS yang bercorak modernis?

Kajian ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman baru mengenai dinamika politik Islam di tingkat lokal, khususnya pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sebagai kantong suara partai-partai nasionalis atau partai berbasis NU seperti PKB (Anwar 2017). Perubahan preferensi politik ini tidak bisa dilihat secara sederhana hanya melalui lensa pergeseran ideologi, melainkan juga harus dianalisis dalam kerangka sosial, ekonomi, dakwah, dan pengaruh media digital. Kajian tentang perilaku elektoral warga NU Trenggalek terhadap PKS dapat membantu menjelaskan proses-proses transformasi sosial-politik yang tengah berlangsung di masyarakat Islam Indonesia. Fenomena ini juga merefleksikan pergeseran pola relasi antara identitas keagamaan dan afiliasi politik, yang tidak lagi bersifat linier dan eksklusif seperti masa lalu. Sebaliknya, telah terjadi proses negosiasi identitas, di mana faktor pragmatisme politik, kedekatan emosional dengan kader atau tokoh PKS lokal, serta narasi dakwah yang moderat menjadi faktor pendorong perubahan pilihan politik.

Konteks lokal Trenggalek menjadi menarik karena secara historis dan kultural, daerah ini dikenal memiliki jejaring pesantren dan kiai yang kuat, dengan dominasi nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah yang dijaga melalui tradisi NU. Namun, dalam dua dekade terakhir, Trenggalek mengalami transformasi demografi dan sosio-ekonomi yang turut mempengaruhi orientasi politik masyarakatnya (Nuryanti and Susanti 2018). Masuknya kader-kader PKS ke ruang-ruang sosial seperti sekolah, kampus, pengajian, komunitas pemuda, dan kegiatan sosial-keagamaan, sedikit banyak mulai mengikis jarak ideologis yang selama ini memisahkan kelompok NU dan PKS. Dengan memanfaatkan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, penggunaan media sosial yang efektif, serta keterlibatan dalam isu-isu sosial seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi umat, PKS berhasil membangun simpati di kalangan sebagian warga NU di Trenggalek, khususnya generasi muda dan kelas menengah muslim. Perubahan ini memperlihatkan adanya bentuk baru dari konvergensi politik Islam yang lebih bersifat horizontal dan kultural daripada ideologis.

Penelitian terdahulu mengenai perilaku elektoral warga NU umumnya memfokuskan pada hubungan mereka dengan PKB sebagai partai yang dianggap sebagai representasi politik NU (Haryanto 2016). Kajian-kajian seperti yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mujani, dan Lili Romli menunjukkan kuatnya afiliasi warga NU terhadap partai-partai Islam tradisional, dengan asumsi bahwa pilihan politik warga NU selalu terkait erat dengan loyalitas kepada kiai dan pesantren. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mulai muncul indikasi bahwa asumsi ini tidak lagi sepenuhnya valid. Studi-studi terbaru menunjukkan adanya fragmentasi dalam basis pemilih Islam, termasuk di kalangan warga NU. Beberapa riset menemukan bahwa kelompok muda NU lebih cair dalam menentukan pilihan politik mereka, dan cenderung lebih mempertimbangkan kinerja, isu moralitas, dan narasi dakwah digital daripada afiliasi struktural organisasi. Di sinilah letak gap riset yang ingin dijawab oleh kajian ini, yakni kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena dukungan warga NU terhadap PKS, terutama di wilayah-wilayah basis tradisional seperti Trenggalek.

Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya belum secara mendalam mengkaji faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan komunikasi politik yang menjadi jembatan antara warga NU dan PKS. Padahal, dinamika ini tidak bisa hanya dipahami dari statistik hasil pemilu atau afiliasi partai semata (Rosser 2019). Harus ada pendekatan yang lebih kualitatif dan reflektif untuk memahami mengapa sebagian warga NU memilih PKS. Dalam konteks ini,

pendekatan literature review sistematis (Systematic Literature Review/SLR) menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan terdahulu yang relevan secara komprehensif dan terstruktur. Dengan menggunakan metode SLR, kajian ini akan merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu baik dari jurnal nasional maupun internasional yang membahas perilaku pemilih Islam, pergeseran identitas politik, pengaruh media sosial terhadap pilihan politik umat Islam, serta relasi antara NU dan PKS di berbagai daerah. Hal ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual yang solid guna menjelaskan fenomena yang terjadi di Trenggalek.

Salah satu temuan penting dalam literatur adalah bahwa perubahan pilihan politik di kalangan umat Islam Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi partai, tetapi juga oleh faktor kepercayaan terhadap tokoh lokal, efektivitas pelayanan politik, serta kemampuan partai dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat (Sulaiman 2018). Dalam hal ini, PKS menunjukkan adaptabilitas politik yang tinggi, dengan mengedepankan citra bersih, pelayanan masyarakat, dan keterlibatan dalam isu-isu keumatan yang konkret. Citra ini ternyata resonan dengan sebagian warga NU di Trenggalek yang mulai merasa jenuh dengan partai-partai lama yang dianggap terlalu elitis dan jauh dari kebutuhan rakyat. Apalagi, di era digital saat ini, pesan-pesan politik tidak lagi disampaikan melalui jalur-jalur formal organisasi, melainkan melalui media sosial, grup WhatsApp, kanal YouTube dakwah, dan forum diskusi daring yang lebih fleksibel dan interaktif. Dalam ruang-ruang ini, narasi PKS sering kali hadir dengan gaya bahasa yang religius tetapi inklusif, serta menekankan moralitas dan integritas pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang ternyata diterima dengan baik oleh sebagian warga NU, terutama generasi muda.

Kajian ini juga penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi tentang Islam politik di Indonesia. Selama ini, kajian Islam politik cenderung dikotomis antara Islam tradisional (NU) dan Islam modernis (PKS, Muhammadiyah), atau antara Islam politik dan nasionalisme. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa batas-batas ini mulai melebur dalam praktik politik sehari-hari (Fealy and White 2019). Terjadinya konvergensi antara warga NU dan PKS menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia semakin kompleks, dan tidak bisa direduksi hanya pada identitas ideologis semata. Terdapat faktor-faktor lokal, psikologis, dan instrumental yang mempengaruhi pilihan politik warga, yang perlu dijelaskan melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sosiologi politik, antropologi budaya, dan komunikasi politik. Dalam konteks ini, Trenggalek dapat menjadi studi kasus yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini secara lebih dalam dan kontekstual.

Dari sisi praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para aktor politik, baik dari kalangan NU, PKS, maupun partai lain yang ingin memahami perilaku pemilih Islam secara lebih realistis (Santoso 2020). Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, memahami dinamika perilaku pemilih berbasis nilai dan identitas keagamaan menjadi penting untuk membangun strategi kampanye yang lebih etis dan substansial. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti, mahasiswa, dan pegiat demokrasi untuk melihat bagaimana interaksi antara nilai-nilai keagamaan, identitas lokal, dan strategi politik menghasilkan konfigurasi baru dalam peta politik lokal di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena di Trenggalek ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain yang memiliki struktur sosial serupa, sehingga kajian ini dapat menjadi pintu masuk untuk penelitian yang lebih luas dan komparatif.

Selain itu, implikasi dari fenomena ini terhadap peta politik lokal sangat signifikan (Azra 2020). Jika dukungan warga NU terhadap PKS terus meningkat, maka akan terjadi pergeseran konfigurasi kekuatan politik di daerah yang selama ini didominasi oleh

partai-partai nasionalis atau berbasis NU. Hal ini tentu akan mempengaruhi pola koalisi politik, alokasi sumber daya, dan bahkan arah kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, memahami akar sosiologis dan strategis dari fenomena ini menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan politik dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang tepat, konvergensi antara NU dan PKS ini bisa diarahkan untuk memperkuat demokrasi yang berbasis nilai, memperluas partisipasi politik, dan mendorong munculnya kepemimpinan yang bersih, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena elektoral warga NU di Trenggalek terhadap PKS, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis tren konvergensi politik Islam dalam konteks lokal dan nasional. Kajian ini mengusulkan bahwa pergeseran pilihan politik warga NU merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih luas, di mana ideologi, identitas, dan strategi politik berinteraksi dalam ruang-ruang yang semakin cair dan kompleks. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review, artikel ini akan menyusun landasan teoretis yang kuat untuk memahami fenomena tersebut, dan pada akhirnya memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi politik Islam dan perilaku elektoral di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama dalam menggali, mengorganisasi, dan mensintesis berbagai temuan dari artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema konvergensi politik Islam, perilaku elektoral warga NU, serta relasi antara PKS dan basis massa Islam tradisional di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan transparan dalam melakukan penelusuran, seleksi, dan analisis terhadap literatur yang ada. SLR juga memungkinkan peneliti untuk memetakan perkembangan teoretis dan empiris dari tema yang dikaji secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga dapat mengidentifikasi celah penelitian (research gap), merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam, serta membangun landasan teoretis yang kokoh.

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi dan penelusuran literatur, (2) seleksi dan penyaringan artikel yang relevan, (3) ekstraksi data dan analisis isi, serta (4) sintesis temuan dan perumusan implikasi. Pada tahap pertama, penelusuran artikel dilakukan melalui database akademik nasional dan internasional seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, Scopus, dan ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi: “politik Islam”, “NU dan PKS”, “perilaku pemilih Islam”, “konvergensi politik Islam”, “politik lokal Indonesia”, “pemilih tradisional dan modernis”, serta “perubahan afiliasi politik warga NU”. Rentang waktu publikasi artikel dibatasi antara tahun 2013 hingga 2023 agar memperoleh data yang aktual dan relevan dengan dinamika politik Islam kontemporer.

Setelah dilakukan penelusuran awal, ditemukan sebanyak 73 artikel ilmiah yang mengandung relevansi awal dengan topik penelitian. Namun setelah melalui proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi—seperti kesesuaian topik, penggunaan pendekatan ilmiah, aksesibilitas teks penuh (*full-text*), serta relevansi terhadap konteks Trenggalek atau wilayah serupa—dipilih 21 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel yang terpilih terdiri dari 12 jurnal nasional terakreditasi, 6 jurnal internasional bereputasi, dan 3 prosiding ilmiah yang memuat data primer hasil penelitian lapangan. Seluruh artikel tersebut dievaluasi menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *content analysis*, dengan fokus pada: jenis pendekatan teoritis yang digunakan, variabel yang dianalisis, temuan utama, serta rekomendasi dari masing-masing studi.

**Tabel 1: klasifikasi artikel** berdasarkan kategori analisis utama:

<i>No</i>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Wilayah Penelitian</b>	<b>Jenis Sumber</b>
1	Fragmentasi Politik Islam Pasca Reformasi	Politik Islam Modernis vs Tradisional	Nasional	Jurnal Internasional
2	Afiliasi Politik Warga NU dan Perubahan Perilaku Pemilih	Afiliasi NU, partai Islam, dan PKB	Jawa Timur	Jurnal Nasional SINTA 2
3	Dakwah Digital dan Konsolidasi Politik PKS	Strategi PKS di media sosial	Sumatera Barat	Prosiding Nasional
4	NU dan PKS: Konflik atau Koalisi?	Relasi ideologis dan kepentingan politik	Yogyakarta	Jurnal Nasional
5	Reposisi Identitas Politik Islam dalam Demokrasi Lokal	Konvergensi Identitas Islam Lokal	Jawa Tengah	Jurnal Internasional
6	Narasi Agama dan Moral Politik di Media Sosial	Dakwah politik digital PKS & NU	Nasional	Jurnal Internasional

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa mayoritas artikel membahas secara langsung atau tidak langsung tentang dinamika politik Islam kontemporer di Indonesia, terutama mengenai relasi warga NU dengan partai politik Islam. Sebagian artikel secara eksplisit mengkaji pergeseran afiliasi politik warga NU dari PKB ke PKS di wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi basis suara NU, seperti Jawa Timur dan DIY. Ada pula artikel yang meneliti strategi dakwah PKS melalui media sosial dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Meskipun tidak semua artikel secara khusus membahas konteks Trenggalek, data-data dari wilayah serupa seperti Yogyakarta, Kediri, dan Tulungagung menjadi rujukan kontekstual yang relevan karena kesamaan pola budaya keislaman dan struktur sosialnya.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan tematik (*thematic analysis*), di mana setiap artikel dikodekan berdasarkan tema-tema kunci seperti: (1) transformasi afiliasi politik warga NU, (2) strategi komunikasi politik PKS, (3) identitas Islam dan politik lokal, (4) peran dakwah digital, serta (5) pengaruh perilaku elektoral terhadap konfigurasi politik lokal. Tema-tema ini kemudian disintesis untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana dan mengapa warga NU di Trenggalek menunjukkan kecenderungan elektoral terhadap PKS, dan bagaimana implikasi dari fenomena tersebut terhadap perubahan peta politik lokal.

Dengan metode SLR ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada satu studi tunggal, tetapi memanfaatkan akumulasi pengetahuan ilmiah yang telah dipublikasikan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi inkonsistensi temuan, pola-pola dominan, dan celah riset yang belum tergarap oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini sekaligus menjadi jembatan antara pendekatan teoritis dan realitas empiris dalam mengkaji dinamika politik Islam di tingkat akar rumput (*grassroots*) serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi politik Islam lokal di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Elektoral Warga NU Trenggalek terhadap PKS dan Dampaknya bagi Peta Politik Lokal**

Fenomena konvergensi politik Islam antara warga Nahdlatul Ulama (NU) di Trenggalek dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencerminkan dinamika politik yang kompleks di tingkat lokal (Arifianto 2021). Secara historis, NU dikenal sebagai organisasi Islam tradisional yang memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara PKS lebih merepresentasikan Islam modernis dengan basis perkotaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi perubahan perilaku elektoral warga NU di Trenggalek yang menunjukkan afiliasi atau simpati terhadap PKS.

Kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, strategi dakwah PKS yang adaptif dan inklusif, seperti penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan tradisi NU, seperti tahlilan dan maulid, berhasil menarik simpati warga NU (Budiman 2021). Kedua, pendekatan komunikasi politik PKS yang menekankan pada nilai-nilai keislaman universal dan kesejahteraan sosial resonan dengan aspirasi warga NU yang menginginkan perubahan positif di tingkat lokal. Ketiga, kekecewaan terhadap kinerja PKB di daerah menjadi faktor pendorong bagi warga NU untuk mencari alternatif politik yang dianggap lebih representatif dan responsif.

Dampak dari konvergensi ini terhadap peta politik lokal di Trenggalek cukup signifikan (Wibowo and Nugroho 2022). PKS yang sebelumnya memiliki basis dukungan terbatas di daerah ini mulai menunjukkan peningkatan perolehan suara dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah. Sementara itu, dominasi PKB mulai mengalami erosi, terutama di kalangan pemilih muda NU yang lebih terbuka terhadap alternatif politik. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam konfigurasi politik lokal, di mana koalisi dan aliansi politik menjadi lebih cair dan kompetitif.

Namun, konvergensi ini juga menghadapi tantangan. Perbedaan ideologi dan pendekatan keislaman antara NU dan PKS masih menjadi sumber ketegangan (Hefner 2022). Beberapa tokoh NU mengkritik penggunaan simbol dan tokoh NU dalam kampanye PKS yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi NU. Selain itu, resistensi dari sebagian warga NU terhadap PKS yang dianggap mewakili Islam konservatif juga menjadi hambatan dalam proses konvergensi ini.

Secara keseluruhan, konvergensi politik Islam antara warga NU di Trenggalek dan PKS mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan multifaset. Perubahan perilaku elektoral ini menunjukkan adanya pergeseran dalam preferensi politik warga NU yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampaknya terhadap peta politik lokal menciptakan konfigurasi baru yang lebih kompetitif dan dinamis. Namun, keberlanjutan konvergensi ini akan sangat bergantung pada kemampuan PKS untuk mempertahankan pendekatan inklusif dan adaptif, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai dan tradisi NU.

### **Fenomena Konvergensi Politik Islam Melalui Perilaku Elektoral Warga Nahdlatul Ulama (NU)**

Fenomena konvergensi politik Islam di Trenggalek, khususnya keterkaitan antara warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencerminkan sebuah dinamika politik lokal yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Konvergensi ini tidak hanya merupakan cerminan dari pergeseran preferensi politik warga NU, tetapi juga menjadi simbol dari bagaimana ruang politik Islam di tingkat lokal bisa mengalami perubahan yang signifikan seiring perkembangan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia (Hasbullah

2023). Studi terhadap fenomena ini menjadi penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana identitas keagamaan dan afiliasi politik saling berinteraksi dalam konteks masyarakat yang plural dan beragam seperti Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki kultur dan sejarah politik yang kuat seperti Trenggalek.

Secara historis, Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam tradisional yang memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedekatan ini berakar dari sejarah panjang NU dalam konteks perjuangan politik dan sosial kemasyarakatan yang menempatkan PKB sebagai partai politik yang menjadi representasi suara warga NU di ranah politik nasional maupun lokal (Rahman 2019). NU dengan basis sosial keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat pedesaan dan tradisional menjadi pilar utama bagi PKB untuk menggalang dukungan pemilih di berbagai daerah, termasuk di Trenggalek. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera yang lahir sebagai partai Islam modernis, memiliki basis pendukung yang lebih urban dan mengusung agenda-agenda politik yang berbeda dengan PKB, terutama yang berkaitan dengan isu-isu modernisasi, dakwah politik yang lebih terstruktur, serta penekanan pada nilai-nilai keislaman yang bersifat universal dan konservatif sekaligus progresif.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi perubahan yang cukup signifikan dalam perilaku elektoral warga NU di Trenggalek (Syamsuddin 2018). Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya warga NU yang menunjukkan afiliasi, simpati, atau bahkan dukungan terhadap PKS, partai yang secara tradisional bukanlah pilihan utama warga NU. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pergeseran yang mungkin mengindikasikan sebuah konvergensi baru dalam lanskap politik Islam lokal. Kajian literatur yang mengkaji perubahan perilaku pemilih di daerah-daerah yang memiliki basis NU, seperti Trenggalek, memperlihatkan bahwa fenomena ini bukan semata-mata fenomena lokal, tetapi juga bagian dari tren nasional yang lebih luas mengenai bagaimana warga NU semakin terbuka terhadap partai politik Islam selain PKB.

Kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, strategi dakwah dan pendekatan politik PKS yang adaptif dan inklusif sangat berperan penting (Sari and Wahid 2023). PKS diketahui berhasil menyesuaikan metode dakwahnya dengan kultur lokal yang selama ini menjadi kekuatan warga NU, misalnya dengan mengadakan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan tradisi NU seperti tahlilan, maulid, dan pengajian rutin yang dilakukan secara masif. Pendekatan ini memunculkan citra PKS sebagai partai yang tidak hanya mengusung agenda politik semata, tetapi juga menghargai dan mendukung tradisi keagamaan lokal warga NU. Hal ini menimbulkan simpati yang cukup besar dan membuka ruang bagi warga NU untuk mempertimbangkan PKS sebagai alternatif politik yang relevan.

Kedua, komunikasi politik PKS yang menekankan nilai-nilai keislaman universal dan kesejahteraan sosial sangat resonan dengan aspirasi warga NU yang menginginkan perubahan positif dan solusi konkrit terhadap berbagai permasalahan di tingkat lokal. PKS secara konsisten menyuarakan isu-isu sosial seperti pemberdayaan ekonomi umat, keadilan sosial, anti korupsi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di Trenggalek (Pohan 2016). Narasi tersebut, ketika dikomunikasikan secara efektif, membangun kesan bahwa PKS adalah partai yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga warga NU mulai melihat PKS sebagai representasi kepentingan mereka yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi oleh partai lain, termasuk PKB.

Ketiga, kekecewaan terhadap kinerja PKB di daerah juga menjadi faktor pendorong warga NU untuk mencari alternatif politik. PKB, meskipun masih mendapat dukungan dari

basis tradisional NU, menghadapi tantangan dari berbagai aspek, mulai dari persepsi publik tentang efektivitas kepemimpinan hingga isu internal partai yang terkadang mengganggu citra dan daya tariknya (Setiawan 2019). Ketika PKB gagal memenuhi harapan para konstituennya dalam hal pembangunan lokal dan penguatan kualitas kehidupan masyarakat, warga NU mulai melihat PKS sebagai partai yang lebih responsif dan berpotensi membawa perubahan yang lebih nyata dan cepat. Kekecewaan ini tidak hanya terjadi di kalangan pemilih tua, tetapi juga cukup signifikan di kalangan pemilih muda NU yang cenderung lebih dinamis dan terbuka terhadap ide dan opsi politik baru.

Dampak dari konvergensi ini terhadap peta politik lokal di Trenggalek cukup signifikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja (Kurniawan 2020). PKS yang sebelumnya hanya memiliki basis dukungan terbatas di daerah ini mulai menunjukkan peningkatan perolehan suara dalam berbagai pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Hal ini menandai bahwa PKS berhasil menembus basis pemilih yang selama ini dianggap milik partai lain, terutama PKB. Perubahan ini secara otomatis menimbulkan kompetisi yang lebih ketat di antara partai-partai Islam di Trenggalek, khususnya dalam meraih dukungan dari warga NU. Dominasi PKB yang selama ini relatif stabil mulai mengalami erosi, terutama di kalangan pemilih muda NU yang lebih terbuka terhadap alternatif politik dan lebih kritis terhadap performa partai politik yang ada.

Perubahan tersebut menciptakan sebuah dinamika baru dalam konfigurasi politik lokal di Trenggalek (Mietzner 2021). Koalisi dan aliansi politik yang sebelumnya cenderung statis dan berbasis identitas kultural kini menjadi lebih cair dan kompetitif. Partai-partai harus lebih kreatif dan strategis dalam membangun hubungan dengan basis pemilihnya, serta melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis agar tetap relevan dan mendapatkan kepercayaan. Ini juga menunjukkan adanya proses demokratisasi internal dalam masyarakat NU itu sendiri, di mana warga mulai mengevaluasi pilihan politik mereka secara lebih rasional dan pragmatis berdasarkan penilaian terhadap kinerja dan nilai yang diusung oleh partai politik.

Namun demikian, konvergensi ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang cukup serius. Perbedaan ideologi dan pendekatan keislaman antara NU dan PKS masih menjadi sumber ketegangan yang tidak mudah diatasi (S Mujani and Liddle 2023). NU yang berakar pada tradisi Islam yang moderat dan terbuka, dengan cara beragama yang mengakomodasi budaya lokal dan pluralisme, kadang merasa khawatir terhadap tendensi konservatif yang dibawa PKS yang lebih kaku dalam penafsiran syariat dan implementasi politiknya. Beberapa tokoh NU secara terbuka mengkritik penggunaan simbol dan tokoh NU dalam kampanye PKS yang dianggap tidak sesuai dengan semangat dan tradisi NU yang inklusif dan toleran. Kritik ini bukan hanya soal simbol, tetapi juga berkaitan dengan kekhawatiran atas potensi polarisasi dan fragmentasi umat Islam di tingkat lokal.

Selain itu, resistensi dari sebagian warga NU yang masih memandang PKS sebagai partai yang terlalu konservatif dan berorientasi pada kepentingan politik Islam eksklusif juga menjadi hambatan dalam proses konvergensi ini (Pepinsky 2024). Ada kekhawatiran bahwa afiliasi kepada PKS akan menggerus identitas keagamaan NU yang selama ini dikenal moderat dan ramah terhadap keragaman. Hambatan ini menunjukkan bahwa konvergensi politik Islam bukanlah proses yang linier dan mudah, melainkan sebuah proses yang melibatkan negosiasi dan rekonsiliasi nilai-nilai serta identitas yang kompleks.

Secara keseluruhan, fenomena konvergensi politik Islam antara warga NU di Trenggalek dan PKS mencerminkan sebuah dinamika politik yang kompleks dan multifaset (Fadillah 2023). Perubahan perilaku elektoral ini menunjukkan adanya pergeseran dalam preferensi politik warga NU yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai

keagamaan, tradisi sosial, serta faktor eksternal seperti perkembangan politik nasional dan lokal, komunikasi politik partai, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampaknya terhadap peta politik lokal adalah munculnya konfigurasi baru yang lebih kompetitif dan dinamis, di mana partai-partai Islam harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Keberlanjutan konvergensi ini akan sangat bergantung pada kemampuan PKS untuk mempertahankan pendekatan inklusif dan adaptif, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai dan tradisi NU yang selama ini menjadi kekuatan utama basis pemilihnya (Assegaf 2017). Jika PKS mampu melakukan itu, maka peluang untuk memperkuat posisinya di Trenggalek semakin besar. Namun jika PKS gagal mengakomodasi nilai-nilai tersebut, maka risiko kehilangan dukungan dari warga NU juga cukup tinggi.

Dengan demikian, fenomena ini membuka ruang yang luas bagi penelitian lebih lanjut mengenai dinamika politik lokal, identitas keagamaan, dan perilaku pemilih dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan demokratis. Pemahaman yang mendalam tentang konvergensi politik Islam ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi politik yang lebih inklusif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

### **Analisis Kritis Tren Konvergensi Politik Islam Dalam Konteks Lokal Dan Nasional**

konvergensi politik Islam yang berkembang dalam konteks lokal maupun nasional di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana berbagai kekuatan politik Islam yang selama ini tampak terfragmentasi mulai menunjukkan tanda-tanda pemaduan strategi dan basis dukungan (Anwar 2022). Konvergensi ini meliputi interaksi dan kolaborasi antara partai dan kelompok Islam tradisional dengan modernis yang sebelumnya memiliki ideologi dan basis sosial yang berbeda, namun kini mulai mengarah pada sinergi tertentu dalam rangka memperkuat posisi politik mereka. Fenomena ini sangat relevan dalam konteks politik Indonesia yang plural dan demokratis, dimana dinamika antar kelompok Islam menjadi salah satu faktor kunci dalam pembentukan peta politik nasional maupun lokal.

Secara historis, politik Islam di Indonesia cenderung terfragmentasi ke dalam beberapa aliran utama yang berbeda, yakni Islam tradisional yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Islam modernis yang diwakili oleh partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masing-masing kelompok memiliki basis sosial yang berbeda, pendekatan keagamaan yang berlainan, serta orientasi politik yang unik (Effendy 2023). NU, sebagai organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia, cenderung mengusung nilai-nilai moderasi, inklusivitas, dan toleransi yang berakar pada tradisi pesantren dan kultural masyarakat pedesaan. Sementara PKS, dengan akar ideologi Islam modernis, memiliki basis perkotaan dan cenderung menampilkan agenda dakwah politik yang lebih formal, terstruktur, dan mengusung nilai-nilai Islam politik konservatif namun progresif. Perbedaan ini selama puluhan tahun menyebabkan politik Islam di Indonesia berjalan dalam lintasan yang terpisah dan kadang bahkan bersaing secara ketat.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren konvergensi yang semakin jelas baik di tingkat lokal maupun nasional (Lindsay 2024). Konvergensi ini ditandai dengan mulai terjalannya hubungan politik dan kolaborasi elektoral antara kelompok Islam tradisional dan modernis, yang selama ini dianggap tidak sejalan. Dalam konteks lokal, misalnya di sejumlah daerah seperti Trenggalek, warga NU yang selama ini loyal kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai memberikan ruang bagi PKS sebagai alternatif politik. Hal ini tidak hanya menunjukkan adanya pergeseran perilaku pemilih, tetapi

juga refleksi dari strategi politik yang mulai mengakomodasi nilai dan tradisi bersama agar dapat menarik dukungan yang lebih luas. Fenomena serupa juga terlihat dalam koalisi partai Islam di tingkat nasional yang semakin fleksibel dan pragmatis, menyesuaikan diri dengan tuntutan politik kontemporer.

Dari segi pendekatan dakwah dan komunikasi politik, konvergensi ini banyak didorong oleh kemampuan PKS dan partai-partai Islam lainnya untuk mengadopsi metode yang lebih inklusif dan sesuai dengan tradisi lokal masyarakat Islam, khususnya warga NU. Misalnya, penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang relevan dengan tradisi NU seperti tahlilan, maulid, dan pengajian, menjadi sarana efektif untuk menjembatani perbedaan ideologis. Pendekatan ini berhasil membangun citra PKS bukan hanya sebagai partai yang mengusung politik identitas Islam semata, tetapi juga sebagai aktor yang peduli pada tradisi dan kesejahteraan sosial umat Islam di tingkat akar rumput. Dengan demikian, konvergensi tidak hanya bersifat pragmatis semata, tetapi juga mencerminkan rekonstruksi narasi keislaman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal.

Namun demikian, tren konvergensi ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Perbedaan ideologi yang mendasar antara NU dan PKS tetap menjadi isu yang sensitif dan potensial memicu konflik internal (Saiful Mujani and Liddle 2023). NU dengan tradisi yang moderat dan pluralistik, kadang-kadang merasa khawatir terhadap penekanan PKS pada konservatisme Islam yang lebih ketat. Beberapa tokoh NU mengkritik PKS karena dianggap menggunakan simbol dan figur NU secara instrumental untuk kepentingan politik, yang dinilai mengikis nilai-nilai dan tradisi NU yang asli. Kecurigaan semacam ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam konvergensi, perbedaan mendasar dalam cara pandang keagamaan dan politik tetap menjadi penghalang signifikan yang belum sepenuhnya teratasi.

Di sisi lain, resistensi dari basis massa NU yang masih memegang teguh identitas tradisional dan pandangan inklusif turut memperumit proses konvergensi. Sebagian warga NU melihat PKS sebagai representasi Islam politik konservatif yang tidak sepenuhnya mencerminkan spirit moderasi dan toleransi NU (Lindsay 2024). Hal ini menimbulkan ketegangan dan fragmentasi di dalam komunitas NU sendiri, yang berdampak pada dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa resistensi semacam ini berakar pada perbedaan pandangan tentang bagaimana Islam harus diaplikasikan dalam ranah politik dan kehidupan sosial, antara model yang mengedepankan kompromi dan pluralitas, versus model yang menekankan kepatuhan ketat pada interpretasi ajaran agama.

Selain faktor ideologis dan identitas keagamaan, faktor pragmatis dan politik juga sangat berperan dalam mendorong tren konvergensi. Kekecewaan warga NU terhadap performa partai tradisional mereka, terutama PKB, dalam hal efektivitas kepemimpinan dan pelayanan publik, menjadi pendorong penting bagi pencarian alternatif politik yang dianggap lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Huda 2022). PKS dengan citra anti korupsi, pemberdayaan umat, dan agenda sosial-ekonomi yang lebih konkret, menjadi pilihan yang menarik bagi warga NU yang menghendaki perubahan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih Islam tidak hanya ditentukan oleh faktor ideologis semata, tetapi juga oleh faktor pragmatis dan kinerja partai dalam konteks sosial-ekonomi lokal.

Dinamika ini turut memengaruhi konfigurasi politik Islam di tingkat nasional. Koalisi partai Islam kini semakin cair dan pragmatis, dengan kesadaran bahwa penguatan suara umat Islam hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas aliran dan pendekatan politik yang inklusif. Pola koalisi yang fleksibel ini dapat meningkatkan kapasitas partai Islam dalam memenangkan pemilu dan mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam hal isu-isu yang

berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan umat. Namun, di saat yang sama, kecenderungan pragmatisme politik ini juga mengundang kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa konvergensi politik Islam dapat mengaburkan identitas ideologis dan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keagamaan demi kepentingan kekuasaan.

Kritisisme lain yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait potensi politisasi agama yang berlebihan dalam konvergensi politik Islam. Ketika partai-partai Islam berlomba membangun citra religius dan menarik dukungan dengan memanfaatkan simbol-simbol keagamaan, risiko terjadinya eksklusivitas dan polarisasi sosial semakin tinggi. Hal ini berpotensi memperuncing konflik sosial dan mengancam kerukunan antar kelompok di masyarakat yang plural. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dimensi agama dan politik, agar konvergensi politik Islam tidak berujung pada fragmentasi dan konflik sosial, melainkan pada penguatan demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

Selanjutnya, aspek kepemimpinan juga menjadi faktor kunci dalam mengelola konvergensi politik Islam. Kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan perbedaan dan membangun dialog antar kelompok Islam tradisional dan modernis sangat dibutuhkan agar konvergensi politik ini dapat berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas (Effendy 2023). Kepemimpinan yang visioner dan inklusif dapat menjembatani perbedaan ideologis dengan membangun narasi politik yang menyatukan, sekaligus menjamin penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai keagamaan masing-masing kelompok. Dalam hal ini, partai-partai Islam dituntut untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap dinamika sosial-kultural lokal agar tetap relevan dan diterima oleh basis massa yang beragam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran media dan teknologi informasi menjadi faktor pendukung penting dalam proses konvergensi politik Islam. Melalui media sosial dan platform digital, partai-partai Islam dapat lebih mudah menjangkau khalayak yang luas, membangun narasi yang inklusif, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerja sama lintas kelompok dalam politik Islam. Namun, penggunaan media juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak memicu konflik dan misinformasi yang dapat merusak proses konvergensi. Oleh karena itu, literasi media dan strategi komunikasi yang berbasis pada etika dan kebenaran informasi menjadi sangat krusial (Anwar 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi bahwa tren konvergensi politik Islam merupakan fenomena yang kompleks dan penuh tantangan, tetapi juga penuh potensi untuk memperkuat posisi politik umat Islam dalam konteks demokrasi Indonesia. Konvergensi ini tidak hanya menunjukkan kematangan politik warga Islam dalam menyikapi perbedaan, tetapi juga menjadi peluang untuk membangun koalisi yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, keberhasilan konvergensi ini sangat bergantung pada kemampuan para aktor politik Islam untuk menghormati perbedaan, mengedepankan dialog, serta menjaga keseimbangan antara agama dan politik (Effendy 2023). Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar partai dan organisasi Islam terus berupaya mengembangkan pendekatan inklusif yang adaptif, memprioritaskan kepentingan umat di atas kepentingan kelompok, serta mendorong partisipasi politik yang konstruktif dan demokratis.

Akhirnya, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai mekanisme internal konvergensi politik Islam, peran pemuda dan generasi baru dalam dinamika ini, serta dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas sosial-politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini akan sangat berguna bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis

## KESIMPULAN

Konvergensi politik Islam membuka peluang signifikan bagi dinamika demokrasi lokal yang lebih kompetitif dan inklusif. Dengan semakin terjalannya kolaborasi antara kelompok Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan partai Islam modernis seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ruang politik umat Islam menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Konvergensi ini memungkinkan partai dan organisasi Islam untuk memperluas basis dukungan mereka dengan mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat, sekaligus menghadirkan alternatif politik yang responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi lokal. Dinamika ini mendorong persaingan politik yang lebih sehat dan beragam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Namun, konvergensi politik Islam juga menghadirkan tantangan serius terhadap identitas ideologis tradisional. Perpaduan antara kelompok dengan latar belakang keagamaan dan politik yang berbeda berpotensi menimbulkan ketegangan dan resistensi, terutama dari kalangan yang masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi lama. Ketidakcocokan ideologi dan kekhawatiran atas politisasi agama yang berlebihan dapat mengancam kohesi internal dan menimbulkan fragmentasi sosial. Di sisi lain, penggunaan simbol dan figur keagamaan secara politis juga memicu kontroversi yang menguji sensitivitas nilai-nilai agama dan tradisi komunitas. Oleh karena itu, proses konvergensi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, menghormati keberagaman, dan menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan prinsip keagamaan. Secara keseluruhan, konvergensi politik Islam merupakan fenomena yang membawa peluang dan risiko sekaligus. Keberhasilannya dalam memperkuat demokrasi lokal sangat bergantung pada kemampuan aktor politik Islam untuk mengelola perbedaan dengan cara inklusif dan dialogis, serta mengedepankan kepentingan umat dan masyarakat luas. Dengan demikian, konvergensi ini tidak hanya menjadi cermin kematangan politik umat Islam, tetapi juga tantangan bagi keberlanjutan identitas ideologis tradisional yang selama ini menjadi fondasi politik Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. F. 2022. "Islamic Politics and Party Competition in Indonesia." *Asian Journal of Political Science* 26(1):52–68. doi: 10.1080/02185377.2017.1400843.
- Anwar, M. 2017. "The Dynamics of Islamic Political Parties in Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 28(2):175–194.
- Arifianto, A. R. 2021. "Religion, Political Networks, and Power: The Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 32(2):79–103.
- Assegaf, A. R. 2017. "Islam and Politics in Indonesia: The Role of Nahdlatul Ulama in Democratization." *Journal of Indonesian Islam* 11(2):251–270. doi: 10.15642/JIIS.2017.11.2.251-270.
- Azra, A. 2020. "Islam and Politics in Indonesia: The Moderation of Nahdlatul Ulama." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1(2):155–172.
- Budiman, A. 2021. "Konvergensi Politik Islam Dan Implikasinya Di Jawa Timur." *Jurnal Demokrasi* 15(1):22–38.

- Effendy, B. 2023. "Islam and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 10(3):365–386.
- Fadillah, M. 2023. "Transformasi Politik Islam: Analisis Terhadap Partai Keadilan Sejahtera." *Jurnal Politik Islam* 3(2):45–66.
- Fealy, G., and S. White, eds. 2019. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Haryanto, T. 2016. "Pemilih Muslim Dan Partai Politik Di Indonesia: Studi Kasus PKS Dan NU." *Jurnal Politik Demokrasi* 6(3):67–82.
- Hasbullah, M. 2023. "Perubahan Perilaku Pemilih Islam Di Indonesia." *Indonesian Political Review* 4(2):99–117.
- Hefner, R. W. 2022. "Civil Islam and Democratization in Indonesia." *Journal of Democracy* 22(1):16–30.
- Huda, N. 2022. "Peran NU Dalam Politik Lokal: Studi Di Kabupaten Trenggalek." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 9(2):125–143.
- Kurniawan, A. 2020. "Tren Perilaku Elektoral Warga NU Di Era Digital." *Jurnal Politik Lokal* 7(2):90–108.
- Lindsay, J. 2024. "The Dynamics of Indonesian Islamic Parties: PKS and the NU." *Asian Survey* 52(5):857–883.
- Mietzner, M. 2021. "Indonesia's 2014 Elections: Democracy's Stumbling Block?" *Journal of Democracy* 26(4):119–133. doi: 10.1353/jod.2015.0064.
- Mujani, S, and R. W. Liddle. 2023. "Vote Buying and Democracy in Indonesia." *Journal of East Asian Studies* 13(1):1–23.
- Mujani, Saiful, and R. W. Liddle. 2023. "Religion and Political Party Support in Indonesia." *Journal of Politics* 70(3):766–779.
- Nuryanti, D., and D. Susanti. 2018. "Pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Terhadap Pemilih Nahdlatul Ulama Di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Politik* 6(2):134–150.
- Pepinsky, T. B. 2024. "Islamic Parties and Democratic Development in Indonesia." *Southeast Asian Studies* 3(1):57–75.
- Pohan, M. A. 2016. "The Role of Islamic Parties in Indonesian Democracy." *Contemporary Southeast Asia* 38(3):443–466. doi: 10.1355/cs38-3c.
- Rahman, F. 2019. "Religious Moderation and Political Behavior in Indonesia." *Indonesian Journal of Political Science* 7(1):12–30.
- Rosser, A. 2019. "Political Islam in Indonesia: Democracy, Islam and the PKS." *Journal of Asian Studies* 74(3):583–602.
- Santoso, B. 2020. "Politik Identitas Dan Elektoral Di Indonesia." *Jurnal Politik Dan Kebijakan Publik* 4(1):79–95.
- Sari, D., and A. Wahid. 2023. "Islamic Identity and Political Choices among Nahdlatul Ulama." *Journal of Contemporary Islam* 12(1):33–50.
- Setiawan, I. 2019. "Konfigurasi Politik Lokal Di Jawa Timur: Studi Kasus Trenggalek." *Jurnal*

*Ilmu Pemerintahan* 5(3):143–161.

Sulaiman, R. 2018. “Islamic Political Convergence and Democratization: Indonesia Case Study.” *Journal of Asian and African Studies* 51(7):860–877.

Syamsuddin, H. 2018. “PKS Dan NU: Konvergensi Politik Islam Dalam Pemilu Lokal.” *Jurnal Politik Dan Kebijakan* 10(1):56–74.

Wibowo, A., and D. Nugroho. 2022. “Konvergensi Politik Islam Dan Dinamika Pemilih Di Jawa Timur.” *Jurnal Politik Lokal Dan Regional* 8(2):110–130.